

## KURIKULUM NASIONAL MATA PELAJARAN SEJARAH MASA ORDE BARU TAHUN 1968-1998

**RIA WINDI SAFITRI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail : [windi200@yahoo.co.id](mailto:windi200@yahoo.co.id)

**Sri Mastuti Purwaningsih**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Politik pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, keterkaitan antara pendidikan dan politik adalah sangat erat, bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Seperti pada saat terjadi perubahan kekuasaan ke masa pemerintahan Orde Baru, maka kebijakan politik yang dirumuskan dalam GBHN juga mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini terlihat pada kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan harus menyesuaikan dengan kebijakan politik tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan kurikulum pendidikan nasional sampai empat kali tahun 1968, 1975, 1984 dan 1994 pada masa Orde Baru. Namun yang menarik adalah, kenyataan disetiap perubahan kurikulum nasional, mata pelajaran sejarah selalu menjadi mata pelajaran yang ditekankan karena fungsinya dalam membentuk nasionalisme dan kepribadian bangsa. Salah satunya yang mendapat reaksi dan polemik adalah mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang adanya kontruksi hegemoni ideologi tertutup yang disembunyikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah. Selain itu, penelitian ini penting untuk membongkar praktek-praktek politisasi pendidikan sehingga pendidikan tidak pernah lepas dari kepentingan penguasa. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang relevan kaitannya dengan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru dan keterkaitannya dengan aspek politik Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah, PSPB, Orde Baru, Hegemoni*

### Abstract

Political education has always been an interesting topic to be discussed. The reason, the link between education and politics is very closely, even pertinent so that the situation can we know that the political roles determine the direction of development of education in a country. Such as in the event of a change of power to the Government of the New Order, then the political policy formulated in the GBHN also affects the national education policy. This is apparent in the curriculum as a set educational plans must adjust with the political policy. As a result, the national education curriculum changes to four times in 1968, 1975, 1984 and 1994 during the New Order. However, what is interesting is the fact every change of the national curriculum, subjects of history have always been subjects that emphasized because its function in shaping the personality of nationalism and the nation. One thing that gets a reaction and polemics are Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). The purpose of this study to get a clear view of the construction of a closed ideological hegemony that is hidden within the history curriculum subjects. In addition, this study is important to dismantle the practices of politicization of education so that education can never be separated from the interests of the authorities. Hopefully, this study can provide an overview of relevant subjects related to the curriculum of the New Order's history and its relevance to the political aspects of Indonesia.

**Keywords:** *Curriculum of History, PSPB, New Order, Hegemony*

### PENDAHULUAN

Pendidikan nasional dalam sejarah peradaban manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting. Untuk mencapai hal tersebut, komponen utama yang terus diperhatikan pemerintah adalah kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan karena merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Salah

satu kurikulum yang penting untuk diperhatikan adalah kurikulum mata pelajaran sejarah yang berfungsi dalam membentuk kepribadian nasional serta identitas suatu bangsa. Hal ini dapat kita lihat pada masa Orde Baru yang disepanjang pemerintahannya, kurikulum Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan (1968, 1975, 1984 dan 1994) dan di dalam setiap perubahan kurikulum tersebut, mata pelajaran sejarah selalu tercantum sebagai bagian dari

mata pelajaran yang ditekankan dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan tugasnya di masa mendatang.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan pemegang kekuasaan yang silih berganti, dimana pemegang kekuasaan saat itu juga memiliki pandangan atau kebijakan politik yang dirumuskan dalam suatu dokumen pemerintah yang disebut dengan GBHN (dokumen politik). Kurikulum (juga kurikulum mata pelajaran sejarah) adalah seperangkat rencana pendidikan yang dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang telah ditetapkan dan dikehendaki dalam dokumen pemerintah tersebut. Hal ini sudah barang tentu, mengingat hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional dalam upaya pembentukan masyarakat.

Pemerintah Orde Baru rupanya menyadari bahwa mata pelajaran sejarah merupakan wahana yang tepat dalam melaksanakan kebijakan politiknya, mengingat peran mata pelajaran sejarah dalam membentuk moralitas, nasionalisme dan kepribadian bangsa agar peserta didik menjadi manusia yang berwatak dan berbudi luhur. Sebagaimana realitas pada tahun 1983, ketika tuntutan dokumen politik menghendaki adanya nilai-nilai kebangsaan maka terjadilah perubahan kurikulum 1984 yang turut pula menghadirkan mata pelajaran sejarah baru yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) disamping sudah ada mata pelajaran Sejarah Nasional yang fokus pembahasannya tidak jauh berbeda dengan PSPB.

Dari kenyataan tersebut, tidak salah jika kita mencurigai adanya praktek-praktek politisasi pendidikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah, khususnya dengan hadirnya mata pelajaran PSPB, yang memang disusun untuk membentuk generasi muda sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kebijakan politik saat itu. Dalam kondisi ini, pendidikan telah menjadi tempat dalam melakukan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni, yaitu penguasaan tanpa paksaan untuk dapat membuat kelompok lain menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma<sup>1</sup> dari pemerintah yang berkuasa demi tujuan legitimasi melalui jalan pendidikan, khususnya kurikulum mata pelajaran sejarah.

Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih dalam tentang kurikulum nasional mata pelajaran sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1968-1998. Selain itu, penelitian ini menarik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang adanya kontruksi hegemoni ideologi tertutup yang disembunyikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah (*hidden curriculum*) untuk menyeragamkan pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda agar sesuai dengan pandangan dan kepentingan pemerintah Orde Baru.

Berdasar pada hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) Apakah mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum 1984 merupakan suatu hegemoni ideologi? (2) Apakah mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum 1984 sebagai *hidden curriculum* ataukah *manifest curriculum*?

## METODE

Penelitian mengenai Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah masa Orde Baru Tahun 1968-1998 menggunakan metode pendekatan sejarah, yang mempunyai empat tahapan proses penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah awal penelitian yang dilakukan yaitu heuristik atau kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang terkait dengan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru. Pencarian sumber dilakukan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Medaya Agung, Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Penulis berhasil menemukan banyak sumber baik sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang telah didapatkan dari beberapa perpustakaan diuraikan sebagaimana berikut, di Perpustakaan Universitas Negeri Malang yaitu dokumen kurikulum sejarah dan PSPB, di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya yaitu surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0462/U/1983, di Perpustakaan Universitas Indonesia berupa surat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di Perpustakaan Medayu Agung Surabaya yaitu berupa majalah Tempo edisi 29 September 1984 "Buku Sejarah itu Dilarang", majalah Tempo edisi 16 Mei 1987 "Sejarah, setelah Pemilu".

Sumber sekunder telah banyak ditemukan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, seperti buku Gunawan berjudul "Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia", dan buku Roger Simon berjudul "Gagasan-gagasan Politik Gramsci". Selain itu, penulis juga memperoleh sumber dari hasil wawancara dengan bapak Syuhada alumni guru PSPB yang mengerti keadaan dilapangan pada saat itu (1986).

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah kritik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian terhadap isi sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dengan memilah informasi yang sesuai dengan tema yang di angkat oleh penulis, yaitu informasi tentang struktur perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah, sehingga nantinya penulis akan

<sup>1</sup> Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1999), Hlm. 40



mendapatkan temuan penelitian berupa fakta tentang perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru. Penulis juga mencari keterkaitan antara sumber yang diteliti, sehingga dapat ditetapkan sebagai utama atau sumber pendukung kurikulum sejarah masa Orde Baru.

Jika fakta telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah penafsiran atau interpretasi. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari sumber yang telah didapatkan. Penafsiran dilakukan penulis terhadap fakta-fakta mengenai perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru. Selain itu, pada tahap penafsiran ini berupaya untuk melihat adanya pengaruh perkembangan kurikulum sejarah masa Orde Baru dengan kepentingan politik saat itu. Oleh karenanya, secara spesifik dalam analisis penelitian ini, khususnya dalam melihat kurikulum 1984, digunakan teori hegemoni ideologi Antonio Gramsci sebagai pisau analisis untuk membuktikan bahwa kurikulum mata pelajaran sejarah telah digunakan sebagai instrumen politik penguasa dalam mempengaruhi generasi muda.

Langkah terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah menyajikan hasil pengolahan data yang dikumpulkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Dalam hal ini, fakta yang telah ditafsirkan ditulis dalam bentuk karya tulis berupa skripsi dengan judul Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998 yang disajikan secara sistematis dan dipaparkan dalam beberapa bab yang saling melengkapi agar mudah difahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kurikulum 1968 dan Mata Pelajaran Sejarah (Sebuah Hegemoni Awal untuk Memutus Pengaruh Soekarno dan PKI Melalui Pancasila)

Sejak pertama kemunculan Orde Baru terus dilakukan upaya untuk merebut aspirasi dan perhatian masyarakat, yaitu dengan menampilkan citra baik tentang kepribadiannya sebagai pemimpin. Upaya ini terutama untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemimpin baru merupakan jelmaan yang diimpi-impikan rakyat, yang membawa perubahan ke masa yang baru, yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, keamanan dan budaya yang carut marut ditinggalkan rezim sebelumnya.

Selain citra pemimpin yang baik, pemerintah melihat pentingnya ideologi negara, Pancasila, dalam usaha membentuk dan menyatukan rakyat secara nasional demi kepentingan-kepentingan kelas penguasa.<sup>2</sup> Usaha pemerintah Orde Baru inilah yang dimaksud Gramsci untuk mendapatkan posisi hegemoni dalam masyarakat Indonesia. Agar hal ini dapat tertanam dan diakui masyarakat, maka pemerintah Orde Baru melihat lembaga pendidikan untuk menanamkan pandangan tersebut tanpa melalui paksaan.

Oleh karena Kurikulum 1968 merupakan kurikulum pertama pada masa Orde Baru, maka

kurikulum inilah yang menjadi sasaran pemerintah dalam membentuk citra baik dan menyatukan rakyat di bawah kepemimpinannya. Terbukti jika kita menganalisis landasan kurikulum 1968, yaitu TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menghendaki pembentukan manusia yang Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945.

Kalimat pembentukan “manusia Pancasilais sejati” ini bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan politik yang harus disebarkan dalam pendidikan berdasarkan kurikulum 1968. Oleh karena itu, digunakanlah mata pelajaran sejarah yang saat itu masih terintegrasi dalam Kewargaan negara dalam kurikulum 1968 menjadi salah satu wahananya.

Mengapa sejarah menjadi salah satu mata pelajaran yang melaksanakan misi tersebut? Tentunya pemerintah melihat pentingnya mata pelajaran ini dalam membentuk pemikiran siswa tentang tragedi nasional Gerakan 30 September 1965 yang merupakan ancaman terhadap Dasar Negara Pancasila, dan menjadi tema sentral pada saat itu untuk menunjukkan peran pemerintah Orde Baru dalam keberhasilannya menumpas dengan gemilang gerakan tersebut di mata sejarah Indonesia. Disini jelas tujuan Orde Baru dalam mata pelajaran sejarah, yaitu menanamkan pandangan atas peristiwa sejarah nasional G30S dilakukan oleh PKI dan juga meyakinkan peserta didik bahwa ada hubungan antara dirinya dengan Pancasila, yaitu sebagai penyelamat dan pelindung Pancasila.

Selain itu, mengingat kondisi politik pendidikan di awal pemerintahan Orde Baru masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pemerintah sebelumnya. Dimana isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol/USDEK. Politik pendidikan nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia dan sebab itu strategi dasar pelaksanaan pendidikan nasional demokratis harus melahirkan patriot yang berdasarkan Pancasila Manipol/USDEK.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Orde Baru untuk menghapus pemikiran tersebut secepat mungkin. Melalui pendidikan sejarah dalam mata pelajaran Kewargaan negara, maka mental masyarakat khususnya generasi muda yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol USDEK Soekarno, akan dapat diubah dengan mental Pancasila murni dan konsekuen yang identik dengan Soeharto.

Jadi hegemoni awal pemerintah Orde Baru melalui mata pelajaran sejarah pada kurikulum 1968 masih dalam taraf pembentukan watak dan pemikiran generasi muda dengan jalan mengidentifikasi dirinya dengan Pancasila, serta untuk memutus pengaruh PKI dan Soekarno dengan tuduhan pengkhianat dan penyimpangan Pancasila. Begitulah tujuan pemerintah Orde Baru yang sebenarnya dalam kurikulum 1968, yaitu memiliki tujuan tersembunyi (*hidden curriculum*). Dengan begitu juga dapat diketahui bahwa mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1968 adalah sebagai salah satu alat hegemoni pemerintah Orde Baru yang pertama dalam pendidikan. Hal ini terutama untuk membentuk watak dan menyeragamkan pola pikir generasi muda agar sejalan dengan pandangan pemerintah yang baru berjalan saat itu.

<sup>2</sup> Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hlm. 87

<sup>3</sup> H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), Hlm. 255

## B. Upaya Mendukung Kebijakan Pembangunan dan Tahap Awal Pewarisan Nilai-Nilai 1945 Melalui Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah 1975

Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 berstatus terintegrasi dalam IPS dan termasuk dalam mata pelajaran yang menanamkan pendidikan Pancasila. Namun jika mencermati isi kurikulum IPS khususnya pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMP dan SMA, maka kurikulum mata pelajaran sejarah pada masa ini bukan hanya sekedar untuk menanamkan ideologi Negara, melainkan juga untuk pewarisan nilai-nilai 1945 dan sebagai alat untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah Orde Baru kepada peserta didik. Hal ini akan diuraikan sebagaimana penjelasan berikut:

### a. Mata Pelajaran Sejarah sebagai Pewarisan Nilai-Nilai 1945

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMP, dimana pada Bahan Pengajaran 2.2.1.1 disebutkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa dan pada 2.2.1.3 disebutkan Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dalam GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMA, pada Tujuan Instruksional 1.2 disebutkan siswa menyadari latar belakang perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Proklamasi Indonesia. Kemudian jika kita memperhatikan pokok-pokok bahasan 1.2.1 disebutkan semangat dan jiwa 1945. Disini jelas, pemerintah ingin membentuk suatu pandangan bahwa Proklamasi kemerdekaan didapatkan karena semangat dan berkat perjuangan 1945, bukan berdasarkan cara lain seperti diplomasi.

Penanaman nilai-nilai 1945 pada mata pelajaran sejarah ini tidak terlepas dari adanya Seminar Angkatan Darat tahun 1972 pada saat itu, yang menekankan tentang generasi 1945 sebagai pemilik "semangat yang unik", dikarenakan mereka berkembang dalam suasana kemerdekaan.<sup>4</sup> Generasi 1945 inilah yang berjuang dalam perjuangan kemerdekaan. Generasi 1945 yang dimaksudkan adalah ABRI. Berdasarkan seminar ini, maka generasi 1945 atau militer harus disebarkan kepada masyarakat Indonesia baik melalui film, museum, memoar, monumen, buku pelajaran sejarah dan pendidikan.

Oleh karena itu, adanya materi tentang nilai-nilai 1945 atau perjuangan kemerdekaan dalam mata pelajaran Sejarah SMP dan SMA sebenarnya memiliki tujuan hegemoni, yaitu untuk menanamkan pandangan tentang perjuangan militer dalam merebut kemerdekaan kepada peserta didik. Dengan begitu peran militer di dalam pemerintahan Orde Baru akan diakui karena jasanya pada saat perang kemerdekaan tersebut.

### b. Mata Pelajaran Sejarah untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMA, dimana pada Tujuan-

Tujuan Instruksional 7.1 disebutkan siswa memahami peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang harga keuangan dan perpajakan. Pada 7.2 disebutkan, siswa menyadari bahwa pembangunan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, dan pada 11.2 disebutkan, siswa menyadari tujuan pembangunan nasional.

Kata memahami dan meyakini disini jelas memiliki tujuan hegemoni agar siswa benar-benar percaya bahwa kebijakan pembangunan yang digagas pemerintah Orde Baru dalam Repelita adalah untuk kemakmuran rakyat. Serta menanamkan pandangan bahwa pemerintah Orde Baru adalah bapak pembangunan yang telah menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia dari keadaan ekonomi yang kolaps akibat inflasi tinggi dan cadangan devisa terekuras yang diwariska oleh pemerintah sebelumnya.

Kiranya ini juga dapat menjawab suatu hal, mengapa tujuan pendidikan dalam dokumen pemerintah yang awalnya :membentuk manusia yang Pancasilais sejati" menjadi "membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila". Kata "pembangunan" ditambahkan sebelum kata Pancasila ini rupanya memiliki tujuan politik, khususnya hegemoni dalam membentuk kepercayaan masa kepada pemerintah Orde Baru atas kebijakan pembangunan yang dilakukan.

### c. Mata Pelajaran Sejarah sebagai Penanaman Ideologi Pancasila

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMP, dimana pada Bahan Pengajaran 8.2.2.1 disebutkan Politik luar negeri bebas aktif yang bersumber pada Pancasila dan UUD. Kemudian dalam GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMA, pada Tujuan Instruksional 10.2 disebutkan siswa menghayati Pancasila sebagai dasar negara, dan pada 10.3 siswa dapat mengamalkan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari.

Disini nampak Orde Baru menggunakan mata pelajaran sejarah untuk menanamkan ideologi Pancasila. Hal ini sebenarnya, upaya pemerintah Orde Baru untuk mengikat masyarakatnya melalui Pancasila. Selain itu nampak pemerintah Orde Baru menggunakan dasar negara Pancasila sebagai tameng kebijakan politik.

Dari sini dapat disimpulkan penulis, bahwa mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 telah digunakan pemerintah Orde Baru sebagai proses hegemoni untuk membentuk pemikiran rakyat tentang perjuangan militer dan untuk mendukung kebijakan pembangunan serta membentuk pemikiran generasi muda bahwa pemerintah Orde Baru lah yang berperan dalam membangun masyarakat Indonesia. Hal ini berarti sama dengan kurikulum 1968, dimana ada usaha pemerintah untuk mentransfermasikan dan membentuk pandangan masyarakat khususnya siswa ke dalam kurikulum mata pelajaran sejarah secara tersembunyi (*hidden curriculum*) melalui beberapa materi. Menariknya, ini akan berubah di tahun 1984 ketika pemerintah secara terang-terangan menggunakan mata pelajaran sejarah untuk membentuk pola pikir, cara bertindak serta rasa patuh generasi muda.

<sup>4</sup> Katherine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Syarikat, 2008), Hlm. 223



### C. Praktek Hegemoni Ideologi Pemerintah Orde Baru dalam Mata Pelajaran Sejarah 1984 (Sebuah Hegemoni Terbesar pada Pendidikan)

Konten penanaman ideologi Pancasila maupun jiwa semangat 1945 salah satunya dilakukan melalui mata pelajaran sejarah yang dimana pada kurikulum 1968 masih berstatus terintegrasi dengan Kewarganegaraan, dan pada kurikulum 1975 terintegrasi dalam IPS. Penanamannya pun masih dilakukan secara tersembunyi (*hidden curriculum*) melalui beberapa materi yang ada dalam mata pelajaran sejarah tersebut.

Namun pada kurikulum 1984, terdapat penambahan konten mata pelajaran sejarah, yaitu PSPB, padahal sudah ada mata pelajaran yang fokus pembahasannya tidak jauh berbeda yaitu Sejarah Dunia dan Nasional. Tujuan mata pelajaran PSPB pun jelas-jelas dalam rangka pendidikan Pancasila dan penanaman nilai-nilai 1945 yang semakin menunjukkan suatu proses perkembangan hegemoni. Pembahasan di bawah ini akan menguraikan bagaimana pada kurikulum 1984, pemerintah Orde Baru secara terang-terangan melakukan politisasi pendidikan menggunakan mata pelajaran PSPB dan Sejarah untuk mengarahkan dan membentuk pola pikir generasi muda :

#### a. Hegemoni pada Materi dan Buku Pegangan yang Telah Tentukan

Melihat isi materi mata pelajaran PSPB dan Sejarah pada kurikulum 1984 memang sengaja dipilhkan untuk kebutuhan pemerintah Orde Baru dalam mengendalikan masa. Terlebih untuk materi PSPB, yang tidak terlepas dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nugroho Notosusanto, sebagai pencetus lahirnya mata pelajaran PSPB ini. Dia-lah yang kemudian yang menjadi kaki tangan pemerintah Orde Baru dalam mengatur isi muatan materi PSPB yang disertai dengan pandangan-pandangan subjektifnya dalam sejarah. Materi tersebut seperti :

Pertama, materi yang sangat mendominasi dalam kurikulum mata pelajaran PSPB maupun sejarah adalah tentang pemerintah Orde Baru. Bahkan dapat dikatakan 70% materi yang disajikan dalam PSPB dan Sejarah khususnya kelas III baik SMP maupun SMA pembahasan tentang Orde Baru sangat mendominasi. Hal ini sudah barang tentu karena Orde Baru adalah rezim yang memegang kekuasaan saat itu.

Dominannya materi tentang penguasa ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP PSPB SMA kelas III, dimana pada Tujuan Kurikuler 4 dan 5 berbicara tentang Orde Baru yang berani membela kebenaran dan keadilan, mengutamakan kepentingan rakyat serta Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian pada Tujuan Instruksional 4.2 tentang Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan rakyat, serta pada 4.3 sampai 5.6 semua menjelaskan kebijakan sosial, ekonomi, politik serta keamanan.

Pada GBPP PSPB SMP kelas III, dimana pada Tujuan Kurikuler 4 berbicara tentang tekad Orde Baru membela kebenaran dan keadilan serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian pada Tujuan Instruksional 4.1 sampai 4.8 kesemuanya berbicara mengenai Supersemar yang merupakan legalitas

berdirinya pemerintahan Orde Baru dan juga kebijakan sosial, politik dan pembangunan nasional pada masa pemerintahannya.

Menariknya lagi, materi PSPB SMP kelas III ini jika dibandingkan dengan materi mata pelajaran sejarah di tingkat SMP kelas III juga, menunjukkan banyak sekali kesamaan. Tentunya ini semakin membuktikan adanya hegemonik pemerintah dalam mempromosikan dirinya kepada siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP bidang studi IPS mata pelajaran sejarah kelas III, pada pokok bahasan 3.1 adalah berbicara tentang Orde Baru. Kemudian pada Uraian pembahasannya juga berbicara tentang Supersemar, stabilitas nasional dan politik serta kehidupan ekonomi berupa pembangunan nasional.

Kedua, dominasi materi tentang peristiwa G30S sekaligus pemberian penekanan bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh PKI. Hal ini dapat dibuktikan dalam GBPP PSPB SMA kelas II pada, Tujuan Instruksional 3.1 disebutkan bahwa pemberontakan PKI merupakan pemaksaan kehendak secara sepihak untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, melihat Bahan Pengajaran yang disajikan, 3.1.5 Peristiwa Jengkol : aksi sepihak PKI, 3.1.6 PKI menuntut agar kaum buruh dipersenjatai, 3.1.7 Isu (fitnah) "Dewan Jenderal", 3.1.8 Pendidikan kilat kader Nasakom, 3.1.9 Masalah sakitnya Presiden Soekarno dan persiapan kudeta PKI, 3.1.10 Pembubaran partai Murba : kampanye PKI untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, 3.1.11 Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Materi tersebut sama dengan materi PSPB SMP kelas II, dimana pada Tujuan Instruksional 3.6 juga disebutkan bahwa PKI memaksakan kehendak dan bertujuan menghapus kebebasan beragama melalui pemberontakan G30S/PKI. Bahan pengajarannya pun sama dengan kelas II SMA, yaitu mulai dari 3. 6.1 sampai 3.6.8 dijelaskan jalannya proses pemberontakan mulai dari teror PKI, Isu Dewan Jenderal, sampai dengan penumpasan gerakan tersebut. Tidak hanya itu, materi mata pelajaran sejarah di tingkat SMP kelas III juga ditemukan pembahasan tentang G30S/PKI, dimana dapat dilihat pada Pokok Bahasan 1.2.3 tentang Masa Demokrasi Terpimpin kemudian melihat uraian pengajarannya yaitu tentang Pemberontakan G30S/PKI dan penumpasannya.

Jika kita cermati, kenyataan tersebut menunjukkan ada persamaan materi PSPB SLTP dengan mata materi pelajaran sejarah SLTP. Anehnya lagi, di tingkat SMTA kelas II ada pengulangan materi G30S/PKI tersebut kembali. Ini membuktikan materi tentang G30S ini sangat ditekankan dalam mata pelajaran sejarah pada kurikulum 1984. Padahal, tidak semua siswa memiliki sentimentil emosional terhadap peristiwa G30S tersebut.

Sepertinya pemerintah Orde Baru adalah pihak yang paling berkepentingan dalam pencegahan bahaya laten kudeta 1965 pada generasi muda, mengingat peran vitalnya sebagai pemimpin dalam penumpasan gerakan tersebut. Oleh sebab itu, materi yang menekankan bahwa gerakan tersebut dilakukan oleh PKI dirasa sangat penting demi pembentukan pola pikir generasi muda dan kelanggengan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Materi tersebut juga berfungsi sebagai "peringatan" bagi generasi muda agar tidak melakukan pemberontakan serupa dan agar selalu menyesuaikan diri terhadap pemerintah Orde

Baru karena rezim ini adalah penyelamat dan menjamin keamanan bangsa Indonesia.

Selain materi yang telah dipilihkan, buku pegangan mata pelajaran PSPB juga ditentukan, ialah buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Pokok PSPB bahwa, buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" menjadi satu-satunya sumber.<sup>5</sup> Memang dalam prakteknya, guru PSPB seperti Bapak Syuhada menjelaskan bahwa, buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" digunakan guru sebagai buku utama dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, karena memang saat itu hanya itu buku satu-satunya yang ada.<sup>6</sup>

Kenyataan di lapangan setelah pemberlakuan mata pelajaran PSPB menunjukkan hal yang kacau, mengingat bahwa tidak tersedia cukup waktu untuk mempersiapkan buku ajarnya sehingga guru diminta memulai mata pelajaran tersebut di tahun 1984 tanpa buku ajar. Maka yang dijadikan pemecahan masalah saat itu adalah buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" sebagai satu-satunya sumber belajar.

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo berpendapat bahwa buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" tidak sesuai karena karya itu tidak diproduksi untuk tujuan pendidikan. Dia bahkan berpendapat bahwa di negara lain isi buku ajar tidak ditentukan penguasa, melainkan berdasarkan kreativitas di luar struktur kekuasaan dan kemudian dievaluasi oleh pemerintah berdasarkan bagian-bagian yang perlu diperbaiki, seperti itulah yang menurutnya bisa diterima.<sup>7</sup> Dibeberapa kesempatan lain, Abdurrachman Surjomihardjo juga mempertanyakan, seberapa jauh guru mendapatkan kebebasan untuk mengajar sejarah. Menurutnya, Guru sekarang ini sudah mendapat intruksi yang ketat. Padahal dulu tidak ada intruksi dan juga tak ada ketentuan buku teks. Guru malah bisa bebas dan menjadi kreatif<sup>8</sup>. Selain materi tentang Orde Baru dan G30S/PKI, materi tentang perjuangan fisik juga ditonjolkan. Pembahasan ini akan kita analisis sebagaimana pembahasan tentang jiwa semangat 1945 berikut ini.

#### **b. Jiwa Semangat 1945 (Sebuah Upaya untuk Menerima Kehadiran Militer)**

Pada penjelasan di atas telah disinggung bahwa pembicaraan mengenai PSPB tidak dapat dilepaskan dari sosok Nurgoho Notosusanto selaku pemrakarsa dan termasuk tim dalam penyusunan kurikulum PSPB. Pada pembahasan ini, kita akan membahas terlebih dahulu sosok Nugroho dan berbagai pengalamannya yang berpengaruh dalam isi materi PSPB tentang jiwa semangat 1945 dan hubungannya dengan militer.

Nugroho adalah orang yang pernah bergabung dalam perjuangan kemerdekaan pada usia empat belas tahun sebagai Tentara Pelajar. Kemudian ketika bergabung dalam organisasi militer buatan Jepang (PETA), Nugroho menunjukkan rasa hormat terhadap gagasan-gagasan Jepang untuk masa perang, misalnya

penekanan pada bushido atau semangat bertempur. Berbeda dengan satuan bersenjata lain, anggota Tentara Pelajar terdiri dari orang-orang nasionalis muda yang tidak berpolitik. Mereka setia kepada pemerintah Republik Indonesia dan bekerja sama dengan TNI.

Pengalaman pada perang kemerdekaan inilah yang kemudian membuat Nurgoho memiliki pandangan tentang Generasi 1945. Pada surat yang ditulis Nurgoho kepada seorang penulis Belanda, Jef Last, Nurgoho menyampaikan pemikirannya yang membedakan generasi 1945 dengan generasi sebelumnya. Nugroho menuliskan bahwa, tentara pelajar yang terdiri dari siswa sekolah menengah dan mahasiswa, dengan suka rela meninggalkan bangku sekolah untuk kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan pribadi yaitu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan bangsa.<sup>9</sup>

Nugroho dalam surat itu jelas menunjukkan bahwa generasinya telah berkorban bahkan sampai menunda sekolah untuk berjuang bagi negeri mereka demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Bahkan pada surat itu, Nugroho menunjukkan kekesalannya dengan nada yang agak menyindir kepada pemimpin sipil, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam perundingan secara diplomatik. Jadi dapat disimpulkan, Nugroho membedakan antara generasi yang berjuang untuk kemerdekaan dengan menggunakan senjata dengan generasi yang hanya berjuang dalam perundingan.

Pada tahun 1972, diadakan Seminar Angkatan Darat bertujuan mewariskan nilai-nilai 1945 yang dihadiri oleh generasi 1945 maupun anggota yang lebih muda. Anggota generasi 1945 dirasa memiliki semangat yang unik dan mereka berkembang dalam suasana kemerdekaan. Gagasan ini mirip dengan pandangan Nugroho dimana sama-sama membandingkan generasi 1945 dengan generasi 1928 dalam konteks partisipasi mereka dalam pergerakan nasional. Penekanannya ada pada mereka yang berjuang dengan memanggul senjata sebagai pejuang kemerdekaan, menunjukkan citra bahwa pejuang kemerdekaan yang didefinisikan sebagai militer adalah bentuk kejantanan dalam berperang. Hasil seminar tersebut berupa pewarisan nilai-nilai 1945 dan Nilai 45 TNI kepada generasi muda.

Dari pengalaman Nugroho menjadi pejuang 1945 serta apa yang diilhaminya dari seminar 1972 seperti yang telah dijelaskan diatas, kiranya dapat menjelaskan segalanya tentang alasan Nugroho sangat gencar dalam komitmennya menanamkan semangat nilai-nilai 1945 kepada generasi muda sehingga memunculkan mata pelajaran PSPB yang jelas-jelas tujuan mata pelajaran tersebut adalah menanamkan nilai-nilai 1945. Nugroho Notosusanto bukan hanya pencetus mata pelajaran PSPB namun sekaligus orang yang mempunyai komitmen besar terhadap sejarah.

Oleh karena itu, materi dalam kurikulum PSPB dibuat dengan tanpa melupakan pandangan militer yang dianut oleh Nugroho tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dokumen kurikulum PSPB tentang Kebijakan Pokok

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kebijakan Pokok Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*, Opcit., Hlm. 7

<sup>6</sup> Wawancara pribadi peneliti dengan Bapak Drs. Syuhada pada 26 Februari 2012, pukul 09.42 WIB

<sup>7</sup> "Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Penyusun buku Pelajaran Sejarah Hendaknya Bertolak dari Strategi Pendidikan", Suara Karya 15 Nopember 1984

<sup>8</sup> "Sejarah, setelah Pemilu" Tempo 16 Mei 1987

<sup>9</sup> Katherine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Opcit., Hlm. 84-85



Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa khususnya pada Isi dan Ruang Lingkup Kurikulum, dinyatakan bahwasanya materi pelajaran PSPB mencakup periode awal perjuangan, perang Kemerdekaan, Zaman Liberal, Orde Baru dan Pembangunan Nasional.<sup>10</sup>

Isi dan ruang lingkup materi PSPB tersebut sangat patut untuk dipertanyakan, mengapa materi PSPB harus dimulai dari awal perjuangan kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru? Tentu alasan yang mendasari mengapa mata pelajaran ini harus dimulai 1945 bisa jadi berasal dari teori Nugroho sendiri mengenai asal usul semangat nasional Indonesia, seperti yang ditulis dalam tesisnya tentang Pembela Tanah Air (PETA) sebuah laskar yang diciptakan Jepang. Pada tesis tersebut, Nugroho menyatakan bahwa 17 Agustus 1945 mencerminkan lahirnya semangat yang baru dan awal yang baru bagi bangsa Indonesia dan tidak benar kalau terlalu banyak perhatian dicurahkan pada pengaruh-pengaruh sebelumnya dalam pembentukan semangat baru ini, seperti misalnya periode pendudukan Jepang.<sup>11</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan, isi dan ruang lingkup materi PSPB tersebut sengaja ditekankan pada semangat 1945 atau sebut saja perjuangan fisik yang dilakukan oleh militer karena Nugroho berpandangan, militer yang awalnya berupa laskar-laskar bikinan Jepang mempunyai peran penting dalam melindungi negara pada perjuangan 1945. Orde Baru juga penting untuk ditonjolkan karena bagian dari militer yang juga melakukan "perjuangan fisik" bagi bangsa Indonesia. Sedangkan pengaruh perjuangan sebelum perang kemerdekaan, tidak penting untuk terlalu diperhatikan karena tidak turut langsung dalam perjuangan mengangkat senjata demi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Penekanan materi tentang semangat 1945 yang dilakukan oleh militer tersebut dapat dibuktikan pada GBPP PSPB SMA kelas I, II, dan III. Dominannya materi tentang militer tersebut sangat dirasakan pada Bahan Pengajaran kelas I SMA 2.1.6 sampai 2.1.10 yang membahas secara lengkap tentang perkembangan awal militer dan kepolisian negara.

Pada Bahan Pengajaran kelas II SMA materi militer sangat dirasakan pada 3.1.1 tentang peleburan bekas KNIL ke dalam APRIS dan pelaksanaan persetujuan KMB dalam bidang militer serta 3.1.12 tentang Dewan Revolusi dan tindakan penumpasan G30S/PKI. Terakhir pada Bahan Pengajaran kelas III SMA materi tentang militer pada 3.8.1 tentang pemulihan keamanan dan ketertiban yang dilakukan militer pasca peristiwa 1965, 4.2.1 tentang Surat Perintah 11 Maret yang merupakan legalitas bagi kelompok militer dalam mengendalikan kekacauan yang terjadi di masyarakat setelah peristiwa 1965 dan 4.2.5 tentang pernyataan ABRI.

Hal ini semakin membuktikan bahwa kurikulum mata pelajaran PSPB telah menjadi semacam alat untuk menanamkan pandangan tentang peran militer bagi bangsa Indonesia. Sehingga dengan pandangan tersebut, peserta didik bisa menerima kehadiran kelompok militer dalam politik penyelenggaraan negara, yang sebenarnya

adalah untuk kepentingan pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan kekuasaan yang mutlak dan absolut.

### c. Upaya Menenggelamkan Soekarno

Jika pembahasan mengenai generasi 1945 oleh militer sangat dominan dalam materi PSPB, hal itu berbanding terbalik dengan materi tentang Soekarno. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Harsya W. Bachtiar yang menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen P & K saat itu. Beliau mengaku kalau sejak awal sudah keberatan dengan PSPB, sebab isinya terlalu berpusat pada perjuangan fisik. Harsya juga menambahkan bahwa dalam PSPB peran Bung Karno kurang ditonjolkan. Padahal Bung Karno bukan tokoh pemimpin yang sembarangan, beliaulah yang berjasa dalam mempersatukan bangsa.<sup>12</sup>

Hal ini sudah barang tentu kalau Soekarno tidak ditonjolkan karena Nugroho memiliki pandangan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimana Soekarno bukan bagian dari militer yang melakukan perjuangan fisik. Artinya disini, siswa berusaha ditanamkan pandangan tentang militer khususnya perjuangan fisik yang dilakukan militer kepada tanah air. Perjuangan yang dilakukan sipil terutama melalui perundingan, seperti yang dilakukan Soekarno tidak harus ditanamkan kepada siswa, begitulah jika mencermati ruang lingkup kurikulum mata pelajaran PSPB gagasan Nugroho tersebut.

Selain kurang ditonjolkannya peran Soekarno, mata pelajaran PSPB juga berusaha untuk menghilangkan ideologi serta konsepsi Soekarno dengan cara mendiskreditkan kebijakan pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan melihat GBPP PSPB SMA pada Tujuan Instruksional 3.7 dimana siswa harus menyadari bahwa sikap semena-mena menyebabkan penyelewengan terhadap UUD 1945. Tuduhan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang dialamatkan kepada Soekarno tersebut terlihat jelas dalam Bahan Pengajaran yang merupakan kebijakan pemerintahan era Orde Lama seperti, 3.7.1 tentang Konsepsi Presiden Soekarno, 3.7.2 tentang Dekrit Presiden dan Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, 3.7.3 Pembentukan Front Nasional, 3.7.4 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 3.7.5 Sidang Umum Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah adalah berusaha menanamkan pandangan kepada siswa kalau konsepsi Presiden Soekarno mulai dari Kabinet Gotong Royong, pembentukan Dewan Nasional, dan doktrin Nasakom merupakan sikap yang semena-mena dan menyeleweng dari UUD 1945. Jika kita mengingat kembali, Nasakom merupakan penyatuan antara nasionalis, agama, dan komunis yang dimana kebijakan itu telah memberikan ruang gerak yang lebar bagi PKI untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Kebijakan inilah yang dianggap sebagai penyimpangan dari Pancasila karena menggandeng komunis yang tidak ber-Tuhan (berhubungan dengan sila 1 Pancasila) ke dalam pemerintahan. AD yang sejak awal bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kebijaksanaan Pokok Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Opcit.*, Hlm. 7

<sup>11</sup> Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), Hlm. 151

<sup>12</sup> *Sejarah, setelah Pemilu*” Tempo 16 Mei 1987

murni dan konsekuen tentu sangat tidak senang dengan gagasan Nasakom, mengingat alasan lain hubungan antara PKI dan AD juga memang tidak harmonis dan tidak mungkin untuk disatukan.

Oleh karena itu ketika Orde Baru berkuasa, ditambah orang yang mengurus pendidikan sekaligus memprakarsa PSPB saat itu berasal dari orang yang sangat loyal terhadap militer, maka segala kebijakan Presiden sebelumnya harus dihilangkan dengan menanamkan pandangan kepada generasi muda bahwa konsepsi Presiden Soekarno adalah menyimpang. Dengan begitu, siswa akan menerima pandangan pemerintah Orde Baru yang menyebut dirinya sebagai pelaksana Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi disini, kurikulum PSPB digunakan sebagai alat untuk menjelekkan kebijakan pemerintahan sebelumnya (Soekarno), sekaligus menghilangkan konsepsi dan ideologinya.

#### **d. Ideologi Pancasila sebagai Pengendalian Tindakan dan Membentuk Rasa Patuh**

Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara memang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Namun di masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila malah dijadikan sebagai alat hegemoni untuk mengendalikan tindakan dan membentuk rasa patuh generasi muda terhadap pemerintah Orde Baru dan segala kebijakannya melalui mata pelajaran PSPB. Kenyataannya memang segala kebijakan pemerintah yang terkenal otoriter ini selalu dihubungkan dengan Pancasila agar masyarakat menyetujui kebijakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan seperti berikut:

Pertama, dalam GBPP PSPB SMTA pada Tujuan Kurikuler 5 disebutkan bahwa siswa harus meyakini Orde Baru bertekad dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Begitupula dalam GBPP PSPB SLTP pada Tujuan Kurikuler 4 disebutkan bahwa siswa mulai meyakini tekad Orde membela kebenaran dan keadilan serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Bukankah hal ini membuktikan bahwasanya Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan? Maksudnya disini, dalam menjalankan setiap kebijakan, pemerintah Orde Baru senantiasa berlandung di balik ideologi Pancasila, sehingga setiap warga negara yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pemikiran seperti ini yang coba ditanamkan dalam diri siswa, yaitu agar siswa mempercayai bahwa segala tindakan yang dilakukan Orde Baru adalah sesuai pengalaman dari Pancasila, oleh karena itu harus selalu dipatuhi.

Kedua, dalam GBPP PSPB SMTA pada Tujuan Instruksional 5.2 disebutkan bahwa siswa harus meyakini kegiatan pemuda serta upaya mengembangkan penghayatan dan pengamalan Pancasila bertujuan mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur mencerminkan semangat kekeluargaan. Hal ini mengarah pada upaya untuk mengatur tindakan generasi muda di dalam sekolah maupun lembaga pendidikan supaya menempatkan Pancasila diatas segala-galanya.

Pengembangan dan Penghayatan Pancasila yang dimaksudkan pada Tujuan Instruksional 5.2 tersebut adalah penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 dijadikan sebagai ideologi

politik yang menggariskan perilaku warga negara Indonesia sesuai dengan tatanan Eka Prasetya Panca Karsa. Namun pada kenyataannya, Penataran P4 sendiri merupakan upaya indoktrinasi masal mengenai kehebatan sang pemimpin dalam menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 dari ancaman kudeta 1965.

Jadi dengan kata lain, melalui P4 generasi muda khususnya peserta didik dibuat untuk mempercayai kalau ada hubungan yang erat antara Pancasila dengan rezim Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang memulihkan nilai-nilai Pancasila dari ancaman kudeta 1965 yang berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Ketiga, dalam GBPP PSPB SMTA pada Tujuan Instruksional 5.5 disebutkan bahwa siswa harus menyadari Musyawarah Nasional Ulama se-Indonesia didorong oleh itikad membina sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Disini secara jelas siswa berusaha ditanamkan pemikiran tentang Asas Tunggal Pancasila. Musyawarah Nasional Ulama se-Indonesia adalah upaya penyeragaman politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mengatur kehidupan kepartaian agar tidak menggunakan asas lain selain Pancasila.

Melalui musyawarah nasional ini, setiap organisasi dan partai politik yang ada pada masa Orde Baru, tanpa terkecuali harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasarnya. Karena jika tidak begitu, maka organisasi dan partai politik yang bersangkutan dianggap anti-Pancasila dan diperlakukan sebagai pelaku kriminal atau subversi. Asas Tunggal dalam kurikulum PSPB ini sebagai pembudayaan tentang kebijakan tersebut dalam dunia pendidikan, sekaligus sebagai cara pemerintah mengatur tindakan generasi muda agar selalu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya Asas.

Dasar tentang penanaman asas tunggal Pancasila dalam kurikulum PSPB ini dapat kita cermati pada tujuan pendidikan nasional berdasarkan TAP MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Ada perubahan arah tujuan pendidikan nasional, dimana sebelumnya pada kurikulum 1975 tujuan pendidikan nasional adalah "membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila" menjadi "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila" pada kurikulum 1984. Penekanan kata "berdasarkan" menunjukkan harus berlandaskan atau harus berazaskan Pancasila.

Hal ini ada hubungannya dengan wacana Asas Tunggal Pancasila yang disampaikan pertama kali oleh pemerintah Orde Baru dalam pidato kenegaraan di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1982 yang menyatakan, semua kekuatan sosial politik yang masih menggunakan asas lain seharusnya menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila. Lebih lanjut dijelaskan, adanya asas lain di samping asas Pancasila yang menjadi ciri khas partai itu akan merangsang unsur-unsur ekstrim baik dari luar maupun dari dalam. Untuk meneruskan niat ini, maka di tahun 1983 pemerintah merasa perlu untuk menyebarkan ide Asas Tunggal Pancasila tersebut ke dalam semua unsur, salah satunya pendidikan.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional dirubah berdasar atau berasaz Pancasila, yang selanjutnya tujuan pendidikan tersebut dijadikan dasar dalam kurikulum 1984. Namun, agar Asas Tunggal Pancasila dapat diterima dan ditaati dengan baik oleh peserta didik,



maka penyebarannya dilakukan pada materi yang ada dalam kurikulum PSPB. Jadi tidak heran jika tujuan Instruksional 5.5 di atas menyinggung tentang Asas Tunggal Pancasila yang sebenarnya tujuannya hanya untuk mengikat generasi muda di bawah perintah Soeharto melalui Pancasila sebagai satu-satunya Asas.

Keempat, dalam GBPP PSPB SMA pada Tujuan Instruksional 5.6 disebutkan siswa harus meyakini bahwa melalui pembangunan nasional bangsa Indonesia secara bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Disini pemikiran siswa berusaha diyakinkan bahwa Pancasila dan pembangunan adalah sejawat yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Pembangunan Nasional Berencana (Pelita I-IV) yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru merupakan bagian dari pengamalan Pancasila, yang oleh karenanya harus didukung. Hal ini membuktikan, Pancasila secara teoretis dijadikan oleh pemerintah Orde Baru sebagai sarana dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional.

Pancasila yang mempunyai kedudukan dan peran penting sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan pemerintah Orde Baru sebagai alat hegemoni untuk membentuk rasa patuh terhadap rezim penguasa. Pemerintah Orde Baru menafsirkan ideologi nasional tersebut secara sedemikian rupa kemudian dijawabantahkan dalam mata pelajaran PSPB untuk mengendalikan tindakan dan membentuk rasa patuh generasi muda agar sejalan dengan penguasa. Inilah yang disebut sebagai hegemoni ideologi Pancasila yang dilakukan pemerintah Orde Baru.

#### e. Tujuan Kurikuler dan Instruksional yang Hegemonik

Tujuan Kurikuler dan Tujuan Instruksional merupakan hal yang penting dalam kurikulum suatu pendidikan karena menggambarkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para lulusan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk berbagai bidang pelajaran. Penjelasan tentang Tujuan Kurikuler adalah tujuan-tujuan bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan di dalamnya, sedangkan Tujuan Instruksional merupakan tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dapat dicapai setelah anak didik menempuh proses belajar-mengajar<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Orde Baru dalam menanamkan doktrinnya pada Tujuan Kurikuler dan Tujuan Instruksional demi tujuan membentuk siswa sesuai dengan apa yang dikehendaki setelah siswa menyelesaikan proses belajar mengajar mata pelajaran PSPB.

Contohnya seperti pada kurikulum PSPB SMA, khususnya pada Tujuan Kurikuler dan Tujuan Instruksional yang sudah dianalisis pada pembahasan sebelumnya, kita menemukan kenyataan bahwa pemerintah mencoba mengarahkan dan mengendalikan siswanya dengan kata-kata kerja yang hegemonik seperti pada tujuan Instruksional, "3.1 siswa **menyadari** bahwa peristiwa-peristiwa APRA, Andi Aziz, dan RMS serta pemberontakan PKI merupakan pemaksaan kehendak secara sepihak untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", "4.1 siswa **menyadari** bahwa

kesatuan-kesatuan aksi melawan PKI didorong oleh keberanian membela kemerdekaan dan keadilan".

Kemudian pada Tujuan Kurikuler "4. siswa **menyadari** dan **meyakini** bahwa Orde Baru berani membela kebenaran dan keadilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta mewujudkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain", Tujuan Instruksional "4.2. siswa **meyakini** bahwa Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat" dan Tujuan Kurikuler "5. siswa **meyakini** bahwa Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen".

Pemikiran dan tindakan siswa selalu diarahkan untuk "menyadari" dan juga "meyakini". Hal itu sama saja dengan siswa diarahkan untuk "menyetujui" bahwa kelompok PKI adalah pemberontak pada tragedi 1965, "menyetujui" bahwa melawan PKI berarti membela kebenaran dan keadilan, serta "menyetujui" bahwa Orde Baru melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Singkatnya, kurikulum PSPB menjadi kekuatan yang membelenggu dan menekan pemikiran serta tindakan siswa.

Kata kerja yang ilmiah dan tidak hegemonik seharusnya yang menuntut siswa untuk lebih aktif dalam penyelidikan, seperti "mengevaluasi", "menalar", "menganalisis", "merekonstruksi", "mengolah informasi". Hal itu sengaja tidak digunakan karena tujuan pemerintah yang sebenarnya memang untuk membentuk pola pikir dan rasa patuh siswa menggunakan peristiwa sejarah versi pemerintah demi kepentingan pemerintah Orde Baru.

Misalnya pada peristiwa sejarah tentang G30S yang jelas-jelas disebutkan di PSPB bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Ini jelas mempunyai tujuan untuk membentuk pola pikir siswa bahwa mereka telah "diselamatkan" oleh pemerintah Orde Baru dari pengaruh jahat, pengaruh dari kaum pemberontak yang memaksakan kehendak dan berbuat semena-mena (itu semua julukan yang dialamatkan bagi PKI pada kurikulum PSPB). Penyajian peristiwa sejarah seperti ini sangat menguntungkan pemerintah Orde Baru agar generasi muda loyal terhadap rezim penguasa saat itu, yaitu Orde Baru.

Selain itu, siswa juga diakrabkan dengan kata-kata "pemberontakan", "penyelewengan UUD 1945", "pemaksaan kehendak", "bersikap semena-mena", "G30S/PKI", "Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Semua kata-kata tersebut tanpa disadari adalah bagian dari hegemoni penguasa dalam membentuk pola pikir generasi muda dalam memandang pelaku maupun peristiwa sejarah tertentu.

Sebagai contoh jika siswa sudah akrab dengan kata-kata tersebut dalam pelajaran sejarah Indonesia, maka siswa pasti sudah hafal sendiri di luar kepala. Jika berbicara "pemberontakan" pasti mengarah pada DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PKI, jika berbicara "penyelewengan UUD 1945" pasti mengarah pada pemerintah Demokrasi Terpimpin dengan konsepsi Nasakomnya, jika berbicara "pemaksaan kehendak" dan "bersikap semena-mena" pasti mengarah pada PKI, jika berbicara "G30S" pasti mengarah pada PKI sebagai pelakunya, jika berbicara mengenai "Pancasila dan UUD

<sup>13</sup> Dr. Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Sinar Biru, Bandung: 1991), Hlm. 24-25

1945 secara murni dan konsekuen” pasti tidak lain dan tidak bukan mengarah pada pemerintah Orde Baru.

Begitulah tujuan Orde Baru sebenarnya dengan menggunakan kata kerja yang hegemonik dan menggunakan istilah yang menyudutkan kelompok lain ini bertujuan untuk mengarahkan pengetahuan sejarah siswa. Ini penting artinya bagi pemerintah Orde Baru, yang tentunya dengan peristiwa sejarah yang diarahkan, maka pemikiran dan pemahaman siswa tentang sejarah bangsa juga akan mudah diatur sesuai dengan cara pandang penguasa dalam melihat peristiwa sejarah yang terjadi. Sehingga, hanya peran pemerintah Orde Baru dalam perjalanan sejarah Indonesia-lah yang paling baik dan bisa diikuti masyarakat khususnya generasi muda, terlebih perannya dalam melindungi masyarakat dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Dari sini dapat penulis simpulkan, bahwa mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1984 juga dijadikan pemerintah Orde Baru sebagai proses hegemoni ideologi. Namun berbeda dengan kurikulum sebelumnya dimana hegemoni yang dilakukan hanya pada beberapa materi dari mata pelajaran sejarah yang statusnya pun masih terintegrasi. Namun hal itu berubah pada kurikulum 1984 ketika terdapat penambahan konten PSPB, maka hegemoni ideologi yang dilakukan sudah menunjukkan adanya praksis kekuasaan dimana secara terang-terangan pemerintah Orde Baru berusaha melegalkan kekuasaan dalam mata pelajaran PSPB dan Sejarah Dunia dan Nasional.

Hal tersebut nampak dari analisis isi kurikulum PSPB dan Sejarah Dunia dan Nasional yang telah dilakukan, dimana kenyataan yang ditemukan bukan hanya dari segi materi dan buku utama yang ditentukan, namun nilai-nilai penguasa rezim seperti nilai-nilai 1945 oleh militer, juga secara terang-terangan nama Soekarno berusaha dihilangkan beserta konsepsinya, penggunaan ideologi Pancasila untuk mengendalikan generasi muda, dan dari segi tujuan Tujuan Instruksional dan Tujuan Kurikuler juga tidak lepas dari hegemonik.

Ini semua yang membuktikan pernyataan penulis di awal, bahwa proses hegemonik pada kurikulum 1984 dengan menggunakan mata pelajaran sejarah, tidak lagi dilakukan secara tertutup melainkan nampak (*manifest curriculum*) sebagai suatu praksis kekuasaan, yang dimana tujuannya bukan hanya mengendalikan dan membentuk pola pikir, tetapi juga untuk tujuan politik legalitas kekuasaan yang harus diterima siswa melalui pembelajaran Sejarah (politik pendidikan), khususnya PSPB yang sangat berbau politik pemerintah Orde Baru.

#### **D. Hegemoni Terakhir Pemerintah Orde Baru Melalui Mata Pelajaran Sejarah 1994**

Pada kurikulum 1994, mata pelajaran PSPB dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam PPKN. Suatu hal yang menarik, bahwa ketika materi dalam PSPB yang sangat menguntungkan pemerintah karena segala pandangan, ideologi dan kebijakan politik disalurkan dalam mata pelajaran PSPB tersebut kepada siswa, lalu mengapa ada perubahan dengan penghilangan mata pelajaran tersebut dalam kurikulum 1994?

Hal ini kiranya dapat kita jawab dengan meletusnya polemik mengenai mata pelajaran PSPB pada tahun 1985, tak lama setelah meninggalnya Nugroho. Pada tanggal 9 September 1985, Lembaga Penelitian Sejarah Nasional di Universitas 17 Agustus menyelenggarakan seminar membahas masalah ini. Kepala lembaga, Dr. Soeroto mengusulkan agar GBHN mengenai PSPB diubah supaya kekacauan yang terjadi dalam pelajaran sejarah di sekolah tidak menjadi parah. Dia juga mengusulkan agar tanggal mulainya sejarah perjuangan bangsa dijatuhkan pada saat datangnya orang asing ke Indonesia.<sup>14</sup>

Memang kekacauan yang terjadi di lapangan adalah tumpang tindihnya mata pelajaran PSPB dengan Sejarah Nasional yang menimbulkan kebingungan guru maupun siswa dalam pembelajaran sejarah. Seperti pendapat Murid SMAN III Jakarta yang menyatakan bahwa materi proklamasi kemerdekaan yang sudah diajarkan di SMP diulang lagi di SMA tanpa pendalaman lebih. Belum lagi terdapat dua mata pelajaran yang berkenaan dengan sejarah yaitu Sejarah nasional dan PSPB yang sebetulnya bisa disatukan. Guru SMAN VI Medan, Abdul Hamid Gani, juga berpendapat bahwa sebenarnya PSPB dan Sejarah Nasional Tumpang Tindih.<sup>15</sup>

Lain lagi dengan pendapat Dekan Fakultas Universitas Negeri Semarang, Dr Hamid Abdullah, yang mempermasalahkan PSPB sebagai upaya menyerang dan mendiskreditkan Soekarno. Abdullah menggambarkan mata pelajaran PSPB sebagai skandal akademik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dia menggambarkan Soekarno sejajar dengan Nehru, Gandhi, Mao, Ho Chi Mint dan tokoh nasionalis lain yang pikiran-pikirannya banyak mengilhami tokoh-tokoh nasional dunia. Mengapa justru nama Soekarno dirobek-robek dan dihancurkan dalam PSPB.

Memang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peran Soekarno memang dihilangkan dengan mendiskreditkan segala kebijakan politik dan ideologinya, bahkan Soekarno juga dianggap menyimpang dari Pancasila karena tidak melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi disini tampaknya masuk akal, dengan meninggalnya Nugroho yang merupakan tangan kanan pemerintah dalam mengendalikan pendidikan sekaligus statusnya sebagai ahli sejarah militer, kemudian adanya protes, kekacauan dan kritik yang dilontarkan para ahli maupun masyarakat di lapangan terhadap PSPB menyebabkan mata pelajaran ini dihilangkan pada kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1994.

Namun dengan hilangnya PSPB, hal ini bukan berarti hegemoni pemerintah Orde baru telah usai. Mengingat pada temuan penelitian sudah dijelaskan, bahwa hegemoni pemerintah Orde Baru dalam mata pelajaran sejarah tetap berjalan dimana status mata pelajaran sejarah saat itu sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di tingkat Pendidikan Dasar dan SMU dengan nama Sejarah Nasional dan Sejarah Umum.

Untuk melihat jalannya hegemoni pemerintah Orde Baru dalam mata pelajaran Sejarah Nasional dan

<sup>14</sup> Katherine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Op cit., Hlm. 280

<sup>15</sup> *Sejarah, setelah Pemilu*” Tempo 16 Mei 1987, Hlm. 57



Sejarah Umum dapat diulas dengan penjelasan di bawah ini:

Pertama, materi penanaman nilai-nilai 1945 oleh militer tetap disajikan dengan sedikit perubahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMP kelas III, dimana pada Pokok Bahasan 2.1 materinya berupa perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Kemudian, salah satu bahan pengajaran dari pokok bahasan tersebut adalah tentang asal usul berdirinya militer Indonesia seperti, pembentukan Komite Nasional Indonesia, Pembentukan BKR-TKR-TNI. Namun menariknya, terdapat bahan pengajaran yang siswa disuruh untuk menguraikan perjuangan menghadapi sekutu NICA baik bersenjata maupun diplomasi. Ini sangat berbeda pada kurikulum sebelumnya, dimana perjuangan fisik sangat ditekankan.

Kedua, materi tentang gangguan keamanan masih tetap mendominasi namun juga terdapat sedikit perubahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat GBPP IPS mata pelajaran sejarah SMP kelas III, dimana pada Pokok Bahasan 3.1 tentang peristiwa-peristiwa pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), bahan pengajaran yang disajikan adalah pergolakan gangguan keamanan dari DI/TII, APRA, Andi Aziz dan RMS. Sedangkan pada Pokok Bahasan 4.1 tentang perkembangan kehidupan bangsa masa Demokrasi Terpimpin, salah satu bahan pengajaran yang disajikan membicarakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang berakhir dengan pengkhianatan G30S/PKI 1965.

Menariknya disini, kata “pemberontakan” yang biasa digunakan untuk menyebut kelompok DI/TII, APRA, Andi Aziz dan RMS diganti dengan “pergolakan daerah”, sedangkan untuk G30S/PKI disebut dengan “Pengkhianatan”. Unsur-unsur perubahan disini mungkin dikarenakan protes yang terjadi pada kurikulum sebelumnya, dimana cara pandang dan penyebutan terhadap gerakan-gerakan ini sangat ekstrim demi kebutuhan pemerintah Orde Baru. Walaupun terdapat perubahan penyebutan terhadap kelompok ini, namun materi sejarah dalam kurikulum 1994 masih tetap hegemonik. Pasalnya melalui materi ini, pemerintah Orde Baru dapat menanamkan pandangan tentang gerakan ini kepada siswa untuk tujuan pencegahan agar tidak terulang kembali, terutama kata-kata penyimpangan Pancasila dan UUD 1994 masih digunakan pasti agar siswa mau mematuhi.

Ketiga, materi tentang Orde Baru masih mendominasi. Maksudnya, materi Orde Baru pada kurikulum 1994 masih sama seperti pada kurikulum sebelumnya yang berbicara segala kebaikan dari pemimpin otoriter tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada Pokok Bahasan 5.1 tentang Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru. Dimana pada Bahan Pengajaran dari Pokok Bahasan ini membahas masa pemerintahan Orde Baru secara lengkap, mulai dari perannya dalam menumpas pemberontakan G30S/PKI, lahirnya SUPERSEMAR yang merupakan legitimasi Orde Baru, kebijakan politik luar negeri, pembangunan nasional serta upaya dalam pemurnian Demokrasi Pancasila melalui Pemilihan Umum.

Dominasi materi tentang Orde Baru ini masih menjadi hal penting pelestarian hegemoni pemerintah Orde Baru dalam pendidikan. Dengan begitu generasi muda akan dapat melihat perjuangan yang sudah

dilakukan pemerintahan Orde Baru bagi bangsa, yang nantinya pemikiran seperti itu akan membuat peserta didik loyal dan menyetujui bahwa kebijakan apa pun yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah demi kepentingan rakyat.

Jadi, mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1994 masih dijadikan pemerintah untuk tujuan hegemoni, walaupun terdapat perbedaan dengan kurikulum 1984 yang dimana hegemoni dilakukan bersifat terang-terangan (*manifest*), terutama dengan adanya PSPB, sedangkan pada kurikulum 1994 penanaman pandangan Orde Baru kembali dilakukan hanya pada beberapa materi dalam mata pelajaran sejarah Nasional dan sejarah Umum. Hanya saja materi yang sifatnya sangat penting untuk kepentingan pemerintah Orde Baru seperti nilai 1945, masalah PKI, dan pemerintahan Orde Baru masih saja dipertahankan dalam materi mengingat hal tersebut penting untuk mengarahkan pandangan rakyat.

Dari semua analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan penulis, bahwa sepanjang perjalanan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru, pendidikan telah dijadikan instrumen politisasi pendidikan. Terlebih dengan adanya PSPB yang nampak sekali adanya praktek hegemoni ideologi yang nyata untuk melegalkan kekuasaan dalam pembelajaran (*manifest curriculum*), yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya maupun sesudah dimana hanya tersembunyi pada beberapa materi yang sifatnya *hidden curriculum* melalui mata pelajaran sejarah.

Hal ini didasarkan pada kenyataan semua isi kurikulum PSPB 1984, yang seharusnya sebagai lintasan untuk mencapai tujuan pendidikan, ternyata terdapat banyak kepentingan-kepentingan politik dalam kurikulum tersebut. Proses kepentingan-kepentingan politik dalam kurikulum PSPB masa Orde Baru inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Sehingga proses hegemonik ideologi maupun penanaman nilai dan pandangan tersebut adalah dalam rangka mempertahankan satu kekuasaan tertentu atas nama pemerintah Orde Baru.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pendidikan tidak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan penguasa, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang penting dalam usaha membentuk kepribadian nasional serta identitas suatu bangsa. Kedudukan ini membuat mata pelajaran sejarah memegang peranan strategis dalam membentuk moralitas, nasionalisme dan watak peserta didik. Bagi pemerintah Orde Baru, hal ini malah dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk menggunakan mata pelajaran sejarah sebagai instrumen politik dengan menanamkan pandangan dan ideologinya ke dalam mata pelajaran sejarah.

Hal ini amat dirasakan sekali bahwa dalam setiap perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah pada masa Orde Baru, muatan-muatan yang berbau politik pemerintah selalu mendominasi seiring dengan situasi politik yang berkembang saat itu. Terlebih pada kurikulum 1984, terdapat penambahan mata pelajaran PSPB, yang hampir keseluruhan isinya adalah untuk kepentingan pemerintah Orde Baru dalam membentuk pola pikir dan rasa patuh siswa terhadap penguasa rezim. Hal ini merepresentasikan bahwa pemerintah melalui mata

pelajaran PSPB dalam kurikulum 1984 telah melakukan hegemoni ideologi menggunakan Pancasila maupun penanaman nilai-nilai 1945 dan militer.

Hegemoni ideologi secara terang-terangan dalam seluruh materi PSPB ini merupakan *manifest curriculum*, dimana praktik kekuasaan untuk melegalkan kekuasaan pemerintah Orde Baru sangat nampak dalam mata pelajaran PSPB. Kurikulum mata pelajaran sejarah yang seharusnya untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka membentuk watak dan jati diri bangsa, malah dijadikan tempat bersemayamnya pandangan, ideologi dan kepentingan-kepentingan pemerintah semakin menunjukkan bahwa mata pelajaran sejarah pada masa Orde Baru tidak pernah lepas dari fenomena politisasi pendidikan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang perlu diajukan adalah netralitas dalam pendidikan, khususnya pada kurikulum mata pelajaran sejarah yang perlu ditingkatkan. Subjektivitas dalam memandang peristiwa sejarah harus ditinggalkan mengingat kurikulum merupakan pedoman yang penting dalam tercapainya tujuan pendidikan, dan pelajaran sejarah yang tidak kalah penting juga dalam membentuk jati diri bangsa. Hal-hal yang sifatnya sensitif tersebut tidak boleh dipengaruhi pandangan-pandangan pribadi karena sangat berhubungan dalam membentuk pola pikir dan pandangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Satu lagi yang menjadi perhatian penulis, rezim penguasa tidak boleh menggunakan pendidikan, khususnya mata pelajaran sejarah maupun mata pelajaran lain sebagai wahana untuk memasukkan propaganda maupun muatan-muatan politiknya dalam rangka membentuk rasa patuh generasi muda terhadap rezim yang sedang berjalan.

Penelitian ini akan dijadikan rujukan bagi penelitian kajian kurikulum. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang menyoroti tentang sejarah pendidikan mata pelajaran sejarah era Orde Baru, maupun politik pendidikan era pemerintahan Orde Baru. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah khususnya kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah kelompok mata pelajaran peminatan Ilmu-ilmu Sosial, pada KD 3.8 Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi dan KD 4.8 Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi, menyajikan dalam bentuk tulisan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Mata pelajaran Sejarah*. Jakarta: Deppen
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Mata pelajaran Sejarah*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Kebijaksanaan Pokok Pendidikan Sejarah*

*Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Pedoman Proses Belajar-Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Mata pelajaran Sejarah*. Jakarta: DeppenDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum: Landasan, Program dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud Propinsi Jawa Timur.

McGregor, Katherine E. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.

Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudjana, Nana. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

#### B. Surat Kabar

Suara Karya 15 Nopember 1984, "Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Penyusun buku Pelajaran Sejarah Hendaknya Bertolak dari Strategi Pendidikan"

Tempo 16 Mei 1987, "Sejarah, setelah Pemilu"